



JUMAT, 13 JULI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Periksa ASN Benteng

BENGKULU, BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu bergerak cepat menyelesaikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng).

Setelah menggeledah kantor Bupati dan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Benteng beberapa waktu lalu, penyidik Kejati Bengkulu memeriksa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Benteng. Setidaknya sudah tiga orang diperiksa, mereka adalah Hasnoli Sastro, Kasubag Umum Sekertariat Pemkab Benteng, Weldo mantan Kabid Anggaran DPPKAD Benteng dan Ujang Iswahyudi yang merupakan mantan Bendahara Rutin Sekertariat Pemkab Benteng yang dimintai keterangan, Rabu (11/7).

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Kasi Penkum, Ahmad Fuadi SH MH mengatakan, langkah pemanggilan saksi setelah melakukan pengeledahan itu untuk menambah bukti dan mempercepat menyelesaikan kasus.

"Setelah melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan sejumlah berkas, kita melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi. Sudah tiga orang kita panggil pasca pengeledahan," jelas Kasi Penkum.

Menurutnya, penyidik memerlukan keterangan lanjutan dari saksi yang dipanggil tersebut diduga kuat berkaitan dengan berkas yang sudah disita. Yang pasti saksi yang dipanggil untuk

memperjelas terkait dugaan korupsi di Pemkab Benteng.

"Keterangan lanjutan terkait berkas yang sudah kita sita," imbuh Kasi Penkum.

Sejauh ini, sejumlah berkas yang sudah disita telah diteliti dan disortir penyidik. Tidak menutup kemungkinan penyidik akan melakukan pengeledahan lagi jika berkas terkait dugaan korupsi tersebut masih dibutuhkan. Terkait informasi penetapan tersangka, Kasi Penkum menegaskan, akan diumumkan secepatnya. Disinggung apakah saksi yang dipanggil pada tahap penyidikan bisa menjadi tersangka, Kasi Penkum menjawab tidak menutup kemungkinan.

"Tidak menutup kemungkinan saksi yang dipanggil tahap penyidikan

bisa menjadi tersangka. Tetapi untuk lebih jelasnya kita tunggu ekspos penetapan tersangka dalam waktu dekat, saat ini tim penyidik masih bekerja melengkapi bukti," pungkas Kasi Penkum.

Untuk diketahui, BPK sudah memberikan batas waktu untuk segera mengembalikan kerugian negara hasil temuan tersebut. Tetapi sampai batas waktu habis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak juga mengembalikan kerugian negara. Tidak heran jika akhirnya kasus tersebut akhirnya diselidiki Kejati Bengkulu. Sampai kasus tahap penyidikan, sekitar 40 orang saksi sudah diperiksa penyidik Kejati Bengkulu. Dari laporan BPK, kasus tersebut diduga merugikan negara Rp 3,2 miliar. (167)